



**NGOPENI.  
NGLAKONI.**  
*Jateng*

## BUKU PANDUAN

# 1 PERANGKAT DAERAH DESA DAMPINGAN MENUJU DESA LEBIH BERDAYA



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Gerakan “**Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampungan Menuju Desa Lebih Berdaya**” merupakan upaya penanggulangan kemiskinan untuk mendukung pencapaian target pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029. Gerakan ini menggunakan konsep “Kolaborasi Multisektor” dengan menjalin kemitraan bersama pihak-pihak lain termasuk non pemerintah (perusahaan, lembaga zakat, filantropi, perguruan tinggi).

Dalam pelaksanaannya, Gerakan ini membutuhkan komitmen bersama guna menumbuhkan semangat gotong royong dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah. Komitmen tersebut dibangun dan ditumbuhkan oleh semua Perangkat Daerah bersama dengan pemerintah kabupaten dan desa serta stakeholder terkait. Selain itu, melalui gerakan ini diharapkan dapat menumbuhkan peningkatan pemahaman dan kemampuan dalam melaksanakan *assessment* dan identifikasi potensi serta kebutuhan di desa dampungan.

Untuk mendukung Perangkat Daerah dalam melakukan *assessment* di desa prioritas dengan tingkat kesejahteraan rendah pada Kabupaten Prioritas penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah, disusun “Panduan Pelaksanaan Gerakan **Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampungan Menuju Desa Lebih Berdaya**” sebagai acuan dan pedoman dalam menentukan intervensi program/ kegiatan. Substansi pedoman meliputi : 1) Pendahuluan; 2) Penjelasan Umum; 3) Pelaksanaan; 4) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan; dan 5) Penutup.

Terimakasih disampaikan kepada segenap pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Panduan ini. Selanjutnya guna perbaikan lebih lanjut, sangat diharapkan masukan dan koreksi terhadap Panduan ini dengan mempertimbangkan kondisi riil dan perkembangan di lapangan.

Semarang, Desember 2025

WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH

Selaku Ketua TKPK Provinsi Jawa Tengah



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>GLOSARIUM</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum .....	4
C. Tim Koordinator Pelaksanaan Gerakan “Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan Menuju Desa Lebih Berdaya” .....	5
D. Maksud dan Tujuan .....	6
E. Sasaran .....	7
F. Manfaat .....	7
G. Hasil yang diharapkan.....	7
<b>BAB II. PENJELASAN UMUM</b> .....	<b>10</b>
A. Batasan Kemiskinan.....	10
B. Data – data Kemiskinan.....	11
C. Strategi Penanggulangan Kemiskinan.....	12
D. Desa Dampingan .....	14
E. Pemberdayaan Masyarakat.....	14
<b>BAB III. PELAKSANAAN</b> .....	<b>17</b>
A. Prinsip Pelaksanaan .....	17
B. Tahapan Pelaksanaan.....	18
C. Pelaksana .....	21
D. Hubungan Antar Pihak.....	21
E. Jangka Waktu Pelaksanaan.....	22
F. Pendanaan .....	22
<b>BAB IV. PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN</b> .....	<b>24</b>
A. Pemantauan .....	24
B. Evaluasi.....	24
C. Pelaporan .....	25
<b>BAB V. PENUTUP</b> .....	<b>27</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>28</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2025.....	4
---	---

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Persentase Kemiskinan Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020 – 2025 .....	2
Gambar 2. Jumlah Penduduk Miskin Antar Provinsi Tahun 2025 (Maret) ..	2
Gambar 3. Presentase Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2025 (Maret)...	3
Gambar 4. Perkembangan Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Menurut Perkotaan dan Pedesaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024 .....	11
Gambar 5. Standar Operasional Prosedur (SOP) Tahapan Pelaksanaan Gerakan “Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan Menuju Desa Lebih Berdaya” .....	20

## **GLOSARIUM**

- BAZNAS** : Badan Amil Zakat Nasional adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat. Baznas merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama di tingkat Nasional, dan bertanggung jawab kepada Gubernur di tingkat Daerah.
- DT JATENG** : Data Terpadu Jawa Tengah adalah data kondisi kesejahteraan sosial masyarakat di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang dasar datanya diambil dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- DT-SEN** : Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional adalah basis data tunggal individu dan/atau keluarga yang memuat kondisi sosial dan ekonomi penduduk Indonesia dan telah dipadankan dengan data kependudukan.
- BPJS** : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan jaminan sosial.
- BPNT** : Bantuan Pangan Non Tunai, adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di e-Warung KUBE PKH/pedagang bahan pangan yang bekerjasama dengan Bank HIMBARA.
- BUMD** : Badan Usaha Milik Daerah, adalah badan usaha yang dikelola, dibina dan diawasi oleh pemerintah daerah. Sebagian besar bahkan secara keseluruhan modalnya berasal dari Negara, yang diambil dari masing-masing pendapatan daerah.
- BUMN** : Badan Usaha Milik Negara, adalah suatu badan yang modalnya berasal dari kekayaan negara dan kemudian pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah.

- FGD : *Foccus Group Disscusion*, diskusi terfokus dari suatu group untuk membahas suatu masalah tertentu, dalam suasana informal dan santai.
- Filantropi : Tindakan seseorang yang mencintai sesama manusia serta nilai kemanusiaan, sehingga menyumbangkan waktu, uang, dan tenaganya untuk menolong orang lain.
- GK : Garis Kemiskinan, merupakan representasi dari rupiah yang diperlukan atau harga yang dibayarkan agar penduduk dapat hidup layak secara minimum.
- GKM : Garis Kemiskinan Makanan, merupakan nilai pengeluaran kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari
- GKNM : Garis Kemiskinan Non Makanan, adalah kebutuhan ninimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.
- KPMD : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, adalah warga desa terpilih yang memfasilitasi atau memandu masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan tahapan PNPM Mandiri Perdesaan di desa dan kelompok masyarakat pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pemeliharaan
- KPS : Kartu Perlindungan Sosial, adalah kartu yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam rangka Program Percepatan dan Perluasan Sosial. Dengan memiliki KPS, rumah tangga berhak menerima program-program perlindungan sosial seperti Raskin dan Bantuan Siswa Miskin.
- KIP : Kartu Indonesia Pintar, adalah kartu yang ditujukan bagi keluarga miskin dan rentan miskin yang ingin menyekolahkan anaknya yang berusia 7-18 tahun secara gratis.
- KTP : Kartu Tanda Penduduk, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Musdes : Musyawarah Desa, adalah proses musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
- PD : Pendamping Desa, adalah jabatan di bawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang bertugas untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat di sebuah desa.
- PLD : Pendamping Lokal Desa, sebuah jabatan sebagai Pendamping Desa di bawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang bertugas untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat di sebuah desa.
- PKH : Program Keluarga Harapan, adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.
- RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 (lima) tahunan yang berisi penjabaran dari visi/misi dan program kepala daerah dengan berpedoman kepada RPJPD dan RPJMN.
- RTLH : Rumah Tidak Layak Huni, rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimal bangunan.
- SID : Sistem Informasi Desa, yang memuat informasi dan data digital desa meliputi kependudukan, pendidikan, kesehatan, kondisi sarana prasarana dasar, kemiskinan dan kerentanan, pembangunan, keuangan desa, asset desa, organisasi

kemasyarakatan, kegiatan ekonomi masyarakat serta informasi kawasan perdesaan.

- TKPK : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, lembaga yang dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan pemangku-pemangku kepentingan di tingkat provinsi, kabupaten dan kota untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan di masing-masing daerah yang bersangkutan.
- TKSK : Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh kementerian Sosial dan/atau dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu pelaksanaan kesejahteraan sosial.
- TJSLP/CSR : Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan/ *Corporate Social Responsibility*, adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
- UPZ : Unit Pengumpul Zakat, adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Baznas untuk membantu pengumpulan zakat.



# BAB I PENDAHULUAN

# **BAB I**

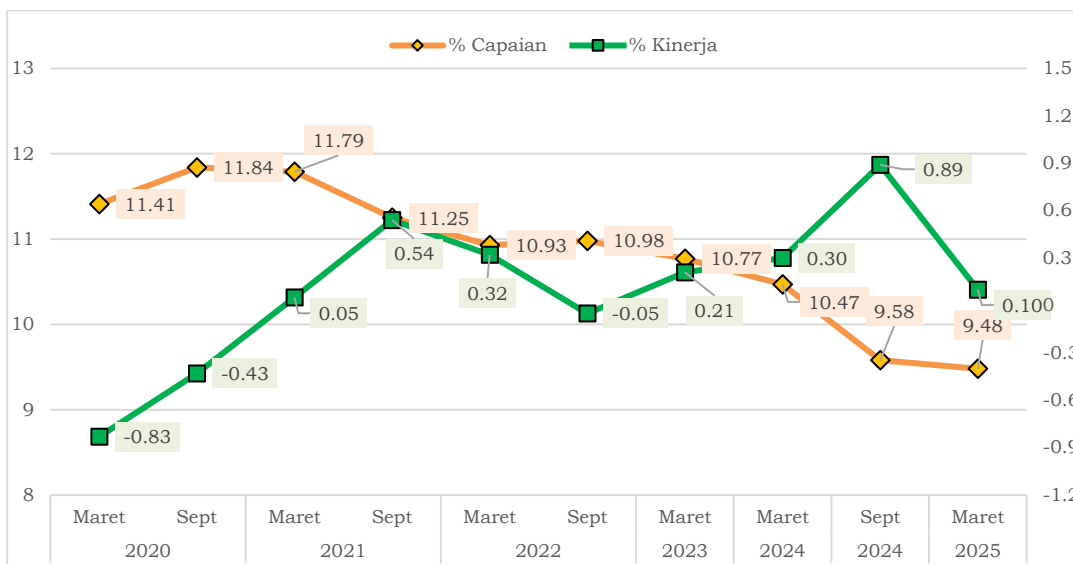
## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 merupakan gambaran penjabaran Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029, dengan visi **“Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045”**. Penjabaran visi, terutama dalam misi kedua, “Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri, dan Berkelanjutan” merupakan upaya untuk mewujudkan **“Jateng Makmur”** salah satunya dengan program prioritas Desa Maju dan Berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan go internasional, Sistem Informasi Desa (SID) dan Tim Tanggap Bencana, merupakan upaya untuk menjawab salah satu isu strategis pembangunan Jawa Tengah yaitu “Penanggulangan Kemiskinan” dimulai dari pembangunan Desa.

Penanggulangan kemiskinan telah sejak lama menjadi isu dan prioritas utama pembangunan nasional dan daerah. Berbagai kebijakan, strategi, program dan kegiatan telah diimplementasikan dalam Skala Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Indonesia baik yang bersifat langsung (program-program perlindungan sosial) maupun yang tidak langsung (program sektoral dan daerah) cukup efektif, ditunjukkan dengan menurunnya jumlah penduduk miskin, termasuk juga di Jawa Tengah.

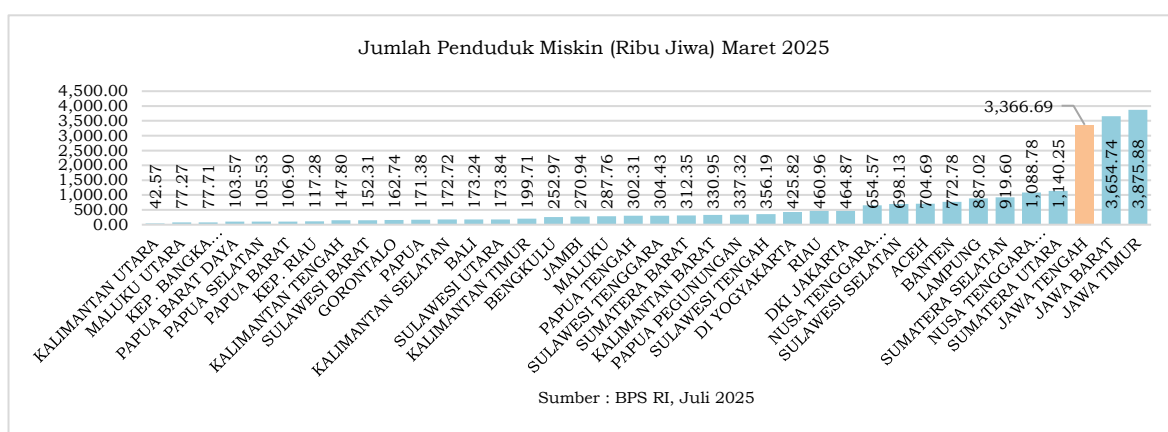
Kemiskinan di Jawa Tengah selama kurun waktu 2020 – 2025 terus menurun dan menunjukkan progres yang cukup signifikan, sebagaimana gambar berikut :



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020 – 2025

**Gambar 1. Persentase Kemiskinan Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020 – 2025**

Jumlah penduduk miskin tahun 2025 (Maret) sebanyak 3.366,69 ribu jiwa (9,48%), menurun sebesar 0,10% dibanding Tahun 2024 (September) sebanyak 3.396,34 ribu jiwa (9,58%), dan menurun 0,99% dibanding Maret 2024 (10,47%). Jika dibandingkan dengan nasional, kondisi tingkat kemiskinan Jawa Tengah masih berada di atas nasional yaitu sebesar 8,47% pada Maret 2025. Meskipun presentase kemiskinan cenderung mengalami penurunan, namun secara absolut jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah masih besar (terbesar ke-3 di Indonesia), sebagaimana gambar berikut:

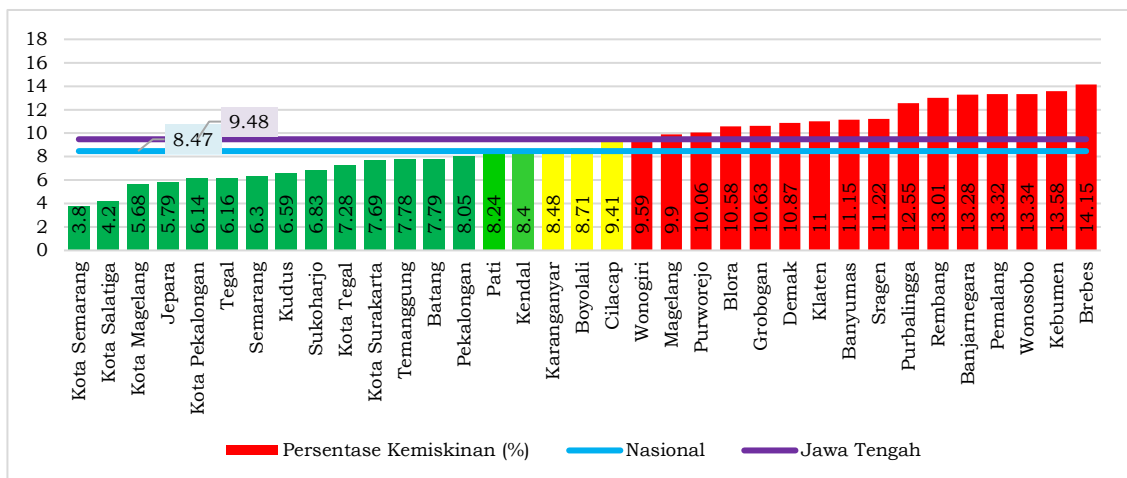


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

**Gambar 2. Jumlah Penduduk Miskin Antar Provinsi Tahun 2025 (Maret)**

Persebaran penduduk miskin di kabupaten/kota di Jawa Tengah terbagi dalam 3 (tiga) kelompok (periode Maret 2025), sebagai berikut:

1. Kabupaten/Kota dengan persentase penduduk miskin di atas provinsi dan di atas nasional sebanyak 16 kabupaten meliputi Brebes 14,15%; Kebumen 13,58%; Wonosobo 13,34%; Pemalang 13,32%; Banjarnegara 13,28%; Rembang 13,01%; Purbalingga 12,55%; Sragen 11,22%; Banyumas 11,15%; Klaten 11%; Demak 10,87%; Grobogan 10,63%; Blora 10,58%; Purworejo 10,06%; Magelang 9,9%; Wonogiri 9,59%;
2. Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di bawah provinsi dan di atas nasional sebanyak 3 kabupaten/kota meliputi Cilacap 9,41%; Boyolali 8,71%; Karanganyar 8,48%;
3. Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di bawah provinsi dan di bawah nasional sebanyak 16 kabupaten/kota meliputi Kendal 8,40%; Pati 8,24%; Pekalongan 8,05%; Batang 7,79%; Temanggung 7,78%; Kota Surakarta 7,69%; Kota Tegal 7,28%; Sukoharjo 6,83%; Kudus 6,59%; Semarang 6,3%; Tegal 6,16%; Kota Pekalongan 6,14%; Jepara 5,79%; Kota Magelang 5,68%; Kota Salatiga 4,2%; Kota Semarang 3,8%.



**Gambar 3. Presentase Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2025 (Maret)**

Berdasarkan wilayah perdesaan dan perkotaan, tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan dan wilayah perkotaan di Jawa Tengah dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2025**

Tahun	Bulan	Penduduk Miskin					
		(ribu jiwa)			(% )		
		Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
2020	Maret	1.805,65	2.175,25	3.980,90	10,09	12,80	11,41
	September	1.890,49	2.229,44	4.119,93	10,57	13,20	11,84
2021	Maret	1.908,33	2.201,43	4.109,75	10,58	13,07	11,79
	September	1.847,09	2.086,92	3.934,01	10,16	12,44	11,25
2022	Maret	1.818,25	2.013,20	3.831,44	9,92	12,04	10,93
	September	1.852,17	2.006,06	3.858,23	10,02	12,05	10,98
2023	Maret	1.821,66	1.969,84	3.791,50	9,78	11,87	10,77
2024	Maret	1.835,51	1.868,82	3.704,33	9,71	11,34	10,47
	September	1.683,75	1.712,59	3.396,34	8,83	10,35	9,58
2025	Maret	1.746,72	1.619,97	3.366,69	9,10	9,92	9,48

*Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020 – 2025*

Jumlah penduduk miskin di perdesaan per Maret 2025 sebanyak 1.619,97 juta jiwa lebih sedikit dibandingkan dengan di perkotaan sebanyak 1.746,72 juta jiwa, namun sesuai persentase data kemiskinan perdesaan (9,92%) lebih besar dibandingkan perkotaan (9,10%). Berdasarkan kondisi tersebut, maka intervensi program/kegiatan penanggulangan kemiskinan utamanya program Desa Dampungan diarahkan ke wilayah perdesaan.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045.
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025 – 2029.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
14. Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/182 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah.

**C. Tim Koordinator Pelaksanaan Gerakan “Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan Menuju Desa Lebih Berdaya”**

Tim Koordinator Pelaksanaan Gerakan “Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan Menuju Desa Lebih Berdaya” di Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut:

No	Nama OPD	Tugas dan Fungsi
1	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	: Mengkoordinasikan perencanaan kebijakan Desa Dampingan OPD Provinsi Jawa Tengah dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah.
2	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah	: Mengkoordinasikan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Desa Dampingan OPD Provinsi Jawa Tengah dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah

No	Nama OPD	Tugas dan Fungsi
3	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	: Menyiapkan data dan informasi bersumber dari basis data mikro kemiskinan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah (DTSEN, DT Jateng dan Data Mikro Lainnya), untuk intervensi program Desa Dampungan dan mengelola data hasil intervensi bersumber data balikan OPD dan pihak terkait, serta melakukan evaluasi capaian tingkat kesejahteraan berupa berkurangnya jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan rendah.
4	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	: Menyiapkan data klasifikasi Desa berdasarkan Indeks Desa sebagai salah satu kriteria dalam penentuan lokus Desa Dampungan, data Sistem Informasi Desa (SID), serta mendorong optimalisasi penggunaan Dana Desa sesuai Permendes PDT dan Permenkeu yang berlaku.
5	Inspektur Provinsi Jawa Tengah selaku APIP Provinsi Jawa Tengah	: Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan program Desa Dampungan oleh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah
6	TKPK Provinsi Jawa Tengah	: Memberikan masukan terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan capaian program Desa Dampungan

#### D. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Panduan ini, untuk memberikan arah dan pedoman bagi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan Gerakan **“Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampungan Menuju Desa Lebih Berdaya”** sebagai salah satu upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah, khususnya pada lokasi desa dengan tingkat kesejahteraan rendah.

Adapun tujuannya adalah :

1. Sebagai pedoman Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan *assessment* dan identifikasi potensi serta kebutuhan di desa dengan tingkat kesejahteraan rendah.

2. Sebagai pedoman Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam menentukan intervensi program/kegiatan penanggulangan kemiskinan sesuai *assessment* dan identifikasi potensi serta kebutuhan di desa dengan tingkat kesejahteraan rendah.
3. Mengevaluasi efektivitas program/kegiatan intervensi penanggulangan kemiskinan.

#### **E. Sasaran**

Sasaran pelaksanaan Gerakan “Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan Menuju Desa Lebih Berdaya” diarahkan pada Desa Prioritas dengan tingkat kesejahteraan rendah di Jawa Tengah, utamanya di Kabupaten dengan persentase kemiskinan di atas rata-rata nasional dan provinsi sesuai rilis data BPS.

#### **F. Manfaat**

Manfaat pelaksanaan Gerakan “Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan Menuju Desa Lebih Berdaya” dalam upaya penanggulangan kemiskinan adalah :

- 1) Mendukung penurunan angka kemiskinan di Jawa Tengah melalui intervensi program/kegiatan maupun pendampingan *updating* DT Jateng;
- 2) Meningkatkan peran seluruh OPD Prov. Jateng dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan melalui kolaborasi program/kegiatan antar OPD;
- 3) Pendampingan terhadap Pemerintah Desa, khususnya Desa dengan tingkat kesejahteraan rendah, dalam optimalisasi penggunaan Dana Desa sesuai Peraturan Menteri Desa maupun Peraturan Menteri Keuangan yang ditetapkan setiap tahunnya sehingga tepat sasaran dan tepat guna;
- 4) Mendorong kolaborasi pentahelix untuk intervensi Program Desa Dampingan sehingga mempercepat penurunan angka kemiskinan di Jawa Tengah.

#### **G. Hasil yang diharapkan**

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan Gerakan “Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan Menuju Desa Lebih Berdaya” dalam upaya penanggulangan kemiskinan, yaitu :

1. Meningkatnya kemampuan dan kreativitas Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan *assessment* dan identifikasi potensi serta kebutuhan di desa dengan tingkat kesejahteraan rendah.

2. Intervensi program/kegiatan penanggulangan kemiskinan oleh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah tepat lokasi, sasaran dan manfaat.
3. Mengevaluasi efektivitas intervensi program/kegiatan penanggulangan kemiskinan bagi desa dengan tingkat kesejahteraan rendah berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatnya kolaborasi dengan para pihak (perguruan tinggi, dunia usaha, dan lainnya).
5. Mendorong peningkatan swadaya dan partisipasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mengembangkan kehidupan berkelanjutan serta menciptakan nilai tambah bagi produktivitas desa.



## **BAB II PENJELASAN UMUM**

## **BAB II**

### **PENJELASAN UMUM**

#### **A. Batasan Kemiskinan**

##### **1. Definisi Kemiskinan**

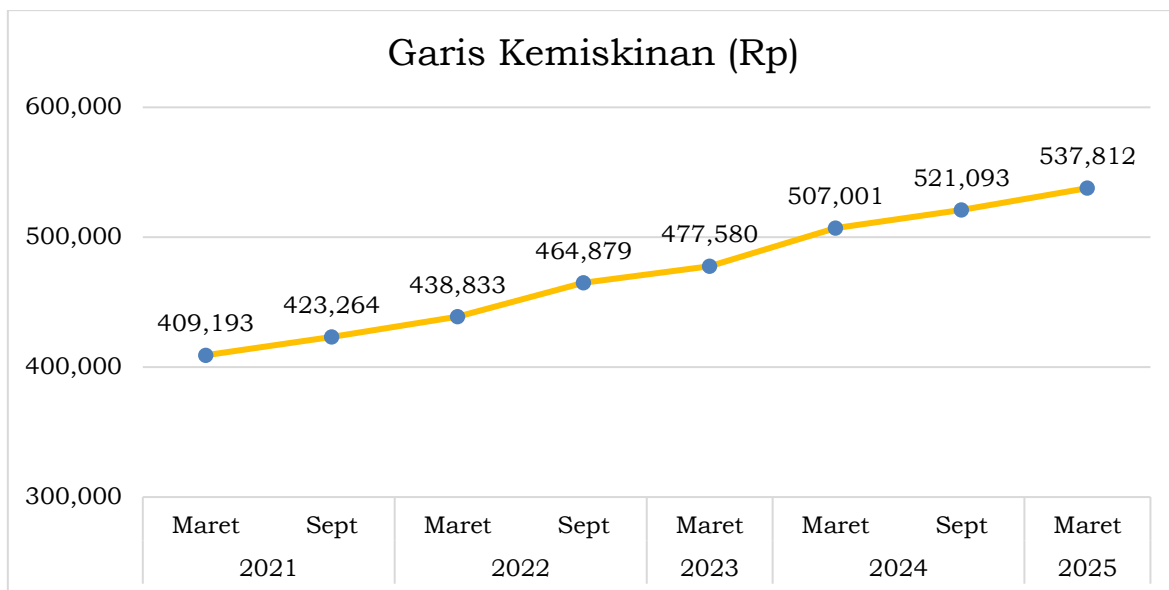
Secara umum, kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Konsep yang dipakai BPS dan juga beberapa negara lain adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), sehingga kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran).

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah Garis Kemiskinan (GK), yang diperoleh dari hasil survei (sampel). Angka kemiskinan yang dirilis BPS merupakan data makro dan merupakan hasil Susenas (Survey Sosial Ekonomi Nasional) yang menunjukkan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah.

##### **2. Garis Kemiskinan**

Garis Kemiskinan merupakan representasi dari rupiah yang diperlukan atau harga yang dibayarkan agar penduduk dapat hidup layak secara minimum yang mencakup pemenuhan kebutuhan minimum makanan (setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari) dan non makanan essential.

Garis Kemiskinan yang digunakan oleh BPS terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) yang terdiri atas 52 jenis komoditi dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) yang terdiri dari 51 jenis komoditi untuk perkotaan, dan 47 jenis komoditi untuk perdesaan. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

**Gambar 4. Perkembangan Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Menurut Perkotaan dan Pedesaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024**

Garis Kemiskinan Jawa Tengah periode Maret 2025 sebesar Rp. 537.812,- per kapita per bulan, meningkat Rp. 16.719,- (3,20%) dibanding periode September 2024 sebesar Rp 521.093,- per kapita per bulan, dan meningkat Rp. 30.811,- (6,07%) dibanding periode Maret 2024 sebesar Rp 507.001,- per kapita per bulan.

**B. Data – data Kemiskinan**

Data terkait kemiskinan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu data makro dan data mikro yang resmi diterbitkan secara berkala oleh BPS.

**1. Data Makro**

Data makro kemiskinan merupakan data yang diperoleh melalui mekanisme survey (sampel), bersifat kualitatif, memberikan gambaran umum dan profil suatu daerah, sebagai bahan analisis untuk pengambilan kebijakan makro penanggulangan kemiskinan, dan tidak dapat menampilkan secara *by name by address*. Contoh data makro adalah data kemiskinan Nasional dan Provinsi yang diterbitkan 2 kali setahun (periode Maret dan September) dan 1 kali setahun periode Maret untuk kabupaten/kota dalam Berita Resmi Statistik BPS.

**2. Data Mikro**

Data mikro kemiskinan merupakan data yang diperoleh melalui mekanisme sensus (bersifat menyeluruh), bersifat kuantitatif untuk mendapatkan informasi detail sebagai basis data intervensi

program/kegiatan secara *by name by address*, dalam hal ini Jawa Tengah menggunakan data bersumber DTSEN.

SIKS-DJ Modul DT Jateng merupakan alat yang dikembangkan untuk melaksanakan pemutakhiran data fakir miskin melalui serangkaian aktifitas verifikasi dan validasi data sejak tingkat desa/kelurahan untuk melengkapi variabel data kondisi rumah tangga dan individu yang pada gilirannya digunakan sebagai data target pensasaran penerima bantuan sosial, pemberdayaan, lokasi kantong kemiskinan. Hasil pemutakhiran melalui SIKS-DJ Modul DT Jateng selanjutnya dipadankan dan dintegrasikan dengan DTSEN yang dikelola oleh Kementerian Sosial maupun Kementerian/Lembaga terkait untuk mengetahui status kesejahteraan sosial masyarakat (desil).

Selain itu, SIKS-DJ Modul DT Jateng juga digunakan sebagai alat untuk memperoleh data hasil intervensi kemiskinan bersumber data balikan dari OPD dan para pihak terkait serta hasil pemutakhiran data oleh Desa/kelurahan sebagai masukan pemutakhiran tingkat kesejahteraan masyarakat.

### **C. Strategi Penanggulangan Kemiskinan**

Mendasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem serta sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, strategi penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui :

#### **1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin**

Diselenggarakan melalui program bantuan sosial dan jaminan sosial yaitu: Bantuan sosial, seperti Bantuan Siswa Miskin (BSM), seragam siswa miskin, Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Kartu Jateng Ngopeni (Kajen), Bantuan dan rehabilitasi sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus seperti lanjut usia, anak, dan penyandang disabilitas, bantuan instalasi sambungan listrik bagi rumah tangga miskin, bantuan sosial dan jaminan perlindungan sosial adaptif lainnya dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

#### **2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan penduduk miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil**

Diselenggarakan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat serta pemberian akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha mikro dan kecil, diantaranya melalui: Peningkatan akses pekerjaan, melalui program Padat Karya, bantuan individu/kelompok, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung akses pekerjaan bagi masyarakat miskin, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melalui program vokasi dan pelatihan, peningkatan akses terhadap aset produktif, akses pinjaman modal, dan akses penggunaan lahan, pendampingan dan penguatan kewirausahaan, melalui peningkatan akses pembiayaan dan pasar, pengembangan dan penjaminan keberlanjutan usaha mikro dan kecil bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil, peningkatan akses pembiayaan usaha mikro dan kecil, melalui peningkatan akses terhadap lembaga keuangan formal baik bank maupun non bank, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).

### **3. Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.**

Strategi ini adalah sinergi kebijakan untuk pemenuhan infrastruktur dasar mendukung peningkatan produktivitas serta pemberdayaan masyarakat, diantaranya melalui: Pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, infrastruktur sanitasi air minum layak, pemberian stimulan jamban serta penanganan rumah sederhana layak huni bagi masyarakat miskin, peningkatan konektivitas antar wilayah, seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan, program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, seperti sinergitas dari dokumen perencanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi, penguatan database kemiskinan (verifikasi dan validasi database kemiskinan), dan penggunaan dana desa untuk penanggulangan kemiskinan.

Strategi utama tersebut didukung dengan peningkatan tata kelola penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan validitas dan reliabilitas data dengan infrastruktur teknologi informasi yang memadai serta proses pendataan secara *bottom up*. Ketiga strategi tersebut dilaksanakan melalui pendekatan intervensi berbasis individu dan kelompok. Pendekatan individu menggunakan data mikro yang telah di verifikasi dan validasi serta terintegrasi dalam basis data

kemiskinan. Sedangkan untuk pendekatan kelompok difokuskan pada manfaat kolektif dengan skala kemanfaatan yang lebih luas yang dampaknya bersifat jangka menengah dan panjang.

#### **D. Desa Dampungan**

Desa Dampungan merupakan target desa lokasi yang memenuhi kriteria untuk dilakukan intervensi penanggulangan kemiskinan, khususnya di Kabupaten Prioritas dengan persentase kemiskinan di atas rata-rata Provinsi dan Nasional (data makro). Pemilihan desa lokasi yang mendapatkan pendampungan dan/atau pembinaan didasarkan pada kriteria tingkat kesejahteraan terendah merupakan Desa Prioritas Penanggulangan Kemiskinan.

Sasaran intervensi program merupakan rumah tangga/individu/kelompok desil 1 - 5 sesuai Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN) yang dikelola Kementerian Sosial maupun Kementerian/Lembaga terkait dan data mikro lainnya.

#### **E. Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan sehingga bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif baru dalam pembangunan masyarakat (Mardikanto, 2014).

Pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa melalui gerakan **“Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampungan Menuju Desa Lebih Berdaya”** dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampungan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Dalam pelaksanaannya pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan prinsip – prinsip sebagai berikut :

- 1) *Partisipasi* : peran serta aktif semua masyarakat/kelompok masyarakat pada setiap tahapan pembangunan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan
- 2) *Keberlanjutan* : menjamin kegiatan tetap dapat dilanjutkan oleh masyarakat dan pemerintah desa

- 3) *Integrasi* : kegiatan dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan disesuaikan kebutuhan desa melalui pencermatan Rencana Pembangunan Menengah Desa yang pada akhirnya desa mampu membiayai sendiri
- 4) *Tranparansi* : semua masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan pembangunan desa sehingga pengelolaan kegiatan dilaksanakan secara terbuka.
- 5) *Prioritas* : masyarakat diberikan kesempatan memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan dan upaya perbaikan lingkungan.
- 6) *Demokratis* : masyarakat mengambil keputusan pembangunan desa dengan musyawarah dan mufakat.

Dengan prinsip – prinsip pemberdayaan tersebut, jika perangkat daerah dan stakeholder sudah tidak melakukan pembinaan/ pendampingan semua tetap dapat dijalankan oleh masyarakat dan pemerintah desa.



## BAB III PELAKSANAAN

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN**

#### **A. Prinsip Pelaksanaan**

##### **1. Komitmen**

Pelaksanaan Gerakan “**Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan Menuju Desa Lebih Berdaya**” membutuhkan komitmen bersama guna menumbuhkan semangat gotong royong dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah. Komitmen tersebut dibangun dan ditumbuhkan secara berkesinambungan oleh semua Perangkat Daerah Pelaksana “**Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan Menuju Desa Lebih Berdaya**” bersama dengan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, stakeholder terkait (Perusahaan, Perguruan Tinggi, Komunitas, Media), dan masyarakat desa.

##### **2. Pengetahuan, Kemampuan dan Keterampilan**

- a. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman Perangkat Daerah pada program-program penanggulangan kemiskinan guna menumbuhkan ide dan kreativitas dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berada pada tingkat kesejahteraan rendah (miskin);
- b. Peningkatan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa dan masyarakat miskin di desa lokasi dampingan.

##### **3. Kemandirian dan Kelembagaan Masyarakat**

- a. Penguatan lembaga kemasyarakatan desa dalam mendukung penanggulangan kemiskinan;
- b. Peningkatan kepedulian dan gotong royong dalam kerangka pemberdayaan masyarakat guna membangun kemandirian desa dan kemandirian masyarakat desa.

##### **4. Keterpaduan dan Koordinasi**

- a. Membangun sinergitas program/kegiatan lintas sektor dalam penanggulangan kemiskinan;
- b. Koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait melalui program-program kemitraan.

##### **5. Fasilitasi Pemerintah**

Perangkat Daerah berperan sebagai fasilitator semua proses pendampingan desa lokasi dalam penanggulangan kemiskinan serta mendorong implementasi Sistem Informasi Desa (SID) oleh Pemerintah Desa.

## **B. Tahapan Pelaksanaan**

### **1. Pemilihan Lokasi**

Pemilihan lokasi desa dampingan oleh Perangkat Daerah diarahkan pada Desa Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, utamanya di Kabupaten dengan presentase kemiskinan di atas rata-rata Nasional dan Provinsi sesuai rilis data BPS.

### **2. Pembentukan Tim Pelaksana Desa Dampingan**

Setiap Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah membentuk Tim Teknis Pelaksana Kegiatan Desa Dampingan yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhan untuk menjalankan tugas dalam kegiatan Desa Dampingan, meliputi: asesmen, pelaksanaan pendampingan dan intervensi, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Desa Dampingan melalui aplikasi SiLap Online.

### **3. Assesment**

*Assesment* dilakukan oleh Perangkat Daerah guna mengetahui kondisi riil desa dampingan melalui:

- a) Inventarisasi program-program penanggulangan kemiskinan di desa dampingan baik oleh pemerintah, *stakeholder* lainnya, serta potensi dan permasalahan desa dampingan, terkait aspek ekonomi, lingkungan/infrastruktur, sosial, untuk mengetahui perkembangan desa guna memudahkan intervensi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan data sederhana sehingga mudah dipraktekkan. Hasil inventarisasi dimaksud dituangkan dalam format pada lampiran I.
- b) “*Scanning* cepat” terhadap karakteristik masyarakat miskin di desa dampingan (format pada lampiran II), meliputi :
  - 1) Tidak masuk dalam kepesertaan program-program pemerintah (KKS, KIP, KIS, BPJS mandiri, PKH, BPNT, BLT).
  - 2) Anggota keluarga yang tidak memiliki kartu identitas (KTP, Akte Kelahiran, Kartu Pelajar, dan KIA);
  - 3) Anak yang tidak bersekolah pada usia sekolah (7-18 tahun);
  - 4) Anggota rumah tangga yang memiliki penyakit kronis dan disabilitas (cacat);
  - 5) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
  - 6) Sumber air minum (sumur/mata air) yang tidak terlindungi;
  - 7) Tidak memiliki fasilitas tempat BAB (jamban);
  - 8) Sumber penerangan utama bukan listrik;

- 9) Kepala rumah tangga yang tidak bekerja;
- 10) Keluarga Resiko Stunting, meliputi Remaja Putri Anemia, Ibu Hamil KEK, dan Anak Stunting.

Data yang digunakan untuk proses *scanning* cepat adalah Data Terpadu Jawa Tengah yang diolah oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Hasil *scanning* cepat selanjutnya dikomunikasikan dalam Musyawarah Desa (Musdes) untuk mendapatkan verifikasi dari berbagai pihak yang disepakati dalam forum Musdes tersebut.

- c) Hasil inventarisasi program penanggulangan kemiskinan dan *scanning* cepat yang merupakan *double checking assesment*, perlu dibahas lebih lanjut melalui FGD dengan masyarakat dan *stakeholder* terkait.
- d) Selain melakukan *double checking assesment*, Perangkat Daerah juga melihat perkembangan implementasi SID yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, untuk memastikan substansi SID berupa informasi digital desa meliputi kependudukan, pendidikan, kesehatan, kondisi sarana prasarana dasar, kemiskinan dan kerentanan, pembangunan, keuangan desa, asset desa, organisasi kemasyarakatan, kegiatan ekonomi masyarakat serta informasi kawasan perdesaan.

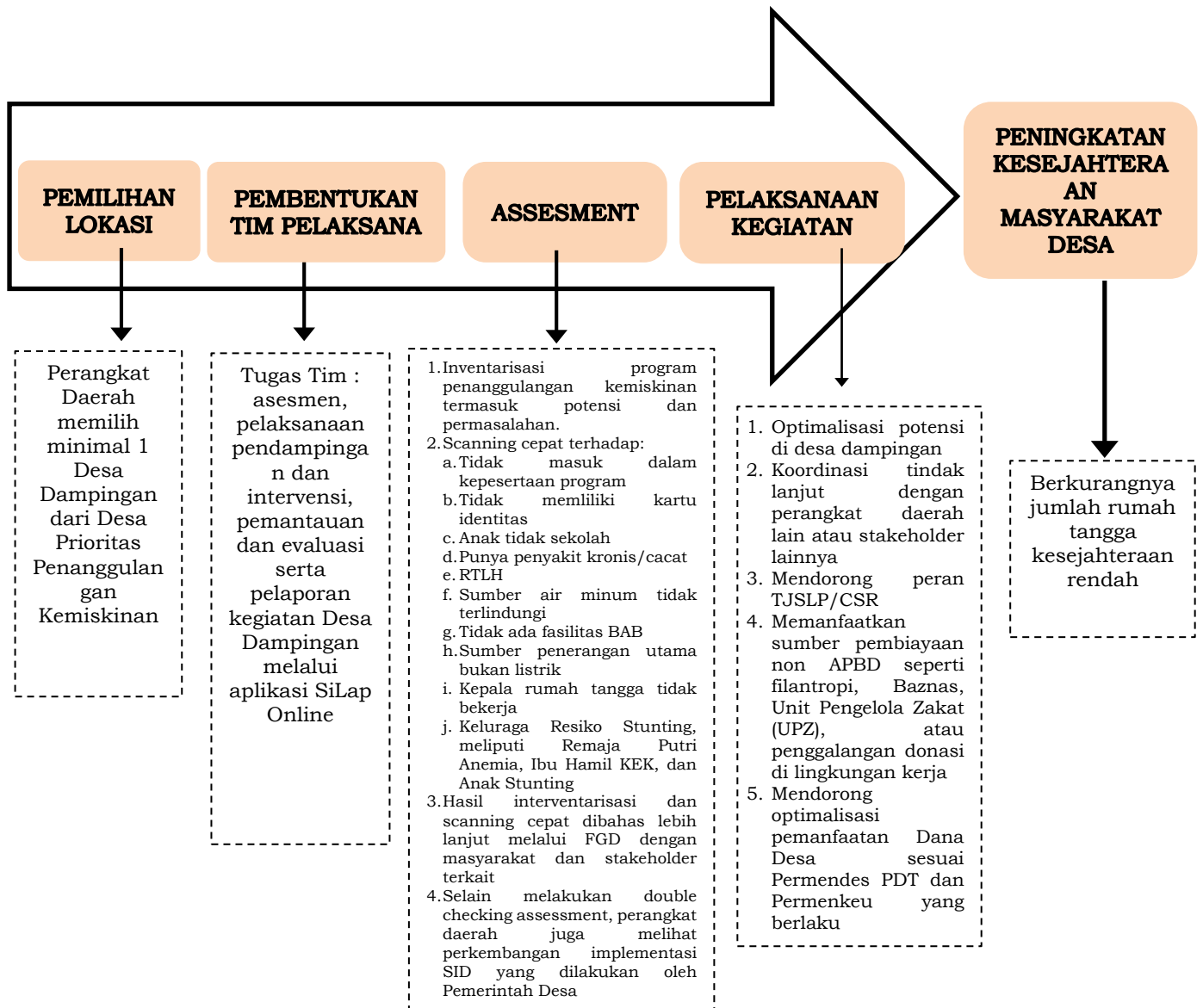
#### **4. Pelaksanaan Kegiatan**

Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Perangkat Daerah sebagai pembina dan fasilitator dengan melibatkan pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa, para pendamping desa (KPMD, PD, PLD, Pendamping PKH, TKSK dan sebagainya) serta masyarakat desa dampingan secara partisipatif, melalui :

- a) Optimalisasi potensi yang tersedia untuk menangani permasalahan desa dampingan;
- b) Mengkoordinasikan tindak lanjut dengan Perangkat Daerah lain atau stakeholder lainnya;
- c) Mendorong peran Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perusahaan, BUMN dan BUMD yang mendukung penanggulangan kemiskinan di desa dampingan;
- d) Memanfaatkan sumber pembiayaan non APBD seperti Filantropi, BAZNAS, Unit Pengelola Zakat (UPZ) atau penggalangan donasi di lingkungan kerja;

- e) Mendorong optimalisasi pemanfaatan Dana Desa sesuai Permendes PDT dan Permenkeu yang berlaku, diprioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Standar Operasional Prosedur (SOP) tahapan pelaksanaan gerakan **“Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampungan Menuju Desa Lebih Berdaya”** dapat diilustrasikan dalam gambar berikut ini :



**Gambar 5. Standar Operasional Prosedur (SOP) Tahapan Pelaksanaan Gerakan “Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampungan Menuju Desa Lebih Berdaya”**

## **C. Pelaksana**

### **1. Pemerintah Provinsi**

Gerakan "**Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampungan Menuju Desa Lebih Berdaya**" dilaksanakan oleh Seluruh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan Gubernur sebagai Pengarah dan Wakil Gubernur sebagai Penanggung Jawab pelaksanaan program/kegiatan di desa dampungan, dengan pembinaan dan pengawasan dari Tim Koordinator Desa Dampungan bersama Inspektorat/APIP Provinsi Jawa Tengah.

### **2. Pemerintah Kabupaten**

Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah secara teknis melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten setempat melalui TKPK dan Dinas Sosial.

### **3. Pemerintah Desa**

Pelaksanaan Gerakan "**Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampungan Menuju Desa Lebih Berdaya**" secara teknis dilaksanakan di desa dengan melibatkan Pemerintah Desa, lembaga-lembaga kemasyarakatan desa, dan pendamping-pendamping desa yang telah menjadi fasilitator di desa dampungan yaitu Pendamping Desa (PD), Pendamping Lokal Desa (PLD), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), Pendamping PKH, TKSK, dan lain sebagainya.

### **4. Mitra Pelaksana**

Selain pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, maupun desa, Gerakan "**Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampungan Menuju Desa Lebih Berdaya**" juga dapat didukung melalui kemitraan melalui TJSLP/CSR Perusahaan, BAZNAS, Unit Pengumpul Zakat (UPZ), Perguruan Tinggi serta dukungan donasi dari berbagai pihak.

## **D. Hubungan Antar Pihak**

Gerakan "**Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampungan Menuju Desa Lebih Berdaya**" merupakan gerakan yang dilaksanakan secara bersama-sama dengan semangat gotong royong untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah, sehingga diperlukan koordinasi di setiap jenjang dan sinergitas program/kegiatan secara lintas sektor serta menjalin kemitraan dengan pihak-pihak yang terkait.

## **E. Jangka Waktu Pelaksanaan**

Gerakan “**Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampungan Menuju Desa Lebih Berdaya**” dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2026 – 2029.

## **F. Pendanaan**

Pelaksanaan Program/Kegiatan Desa Dampungan dapat didanai melalui APBN, APBD, Dana Desa, Filantropi, Baznas/UPZ, CSR Perusahaan, BLUD dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.



# **BAB IV**

# **PEMANTAUAN, EVALUASI,**

# **DAN PELAPORAN**

## **BAB IV**

### **PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN**

#### **A. Pemantauan**

Pemantauan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah untuk mengetahui proses pelaksanaan kegiatan dengan maksud untuk melihat kemajuan pelaksanaan kegiatan tersebut sekaligus melihat berbagai hal yang mendukung atau menghambat pelaksanaan gerakan **“Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampungan Menuju Desa Lebih Berdaya”**. Metode yang digunakan dalam pemantauan dapat dilaksanakan dengan dialog dengan teknik FGD, observasi, tinjauan lapangan dan kajian dokumen (format pada lampiran III dan lampiran IV).

Hasil pemantauan progres intervensi di Desa Dampungan baik Laporan Progres Bulanan maupun Laporan Pemantauan sesuai Format Lampiran III dan IV dilaporkan secara rutin oleh Perangkat Daerah kepada Tim Koordinator Desa Dampungan melalui aplikasi SiLap Online.

#### **B. Evaluasi**

Evaluasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui dampak dan/atau perubahan kondisi potensi desa dan karakteristik masyarakat miskin dalam pelaksanaan gerakan **“Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampungan Menuju Desa Lebih Berdaya”**. Evaluasi dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan format pada lampiran V dan lampiran VI.

Hasil Evaluasi kegiatan Desa Dampungan oleh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana format Lampiran V dan VI dilaporkan secara rutin kepada Tim Koordinator Desa Dampungan melalui aplikasi SiLap Online

Tim Koordinator Desa Dampungan melakukan verifikasi hasil evaluasi kegiatan Desa Dampungan yang dilakukan Perangkat Daerah tersebut setiap Semester guna memastikan dampak efektivitas intervensi pendampungan.

### **C. Pelaporan**

Sebagai implementasi prinsip akuntabilitas, maka Tim Koordinator Desa Dampungan menyusun Laporan Pelaksanaan Gerakan **“Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampungan Menuju Desa Lebih Berdaya”**.

Pelaporan disampaikan kepada Wakil Gubernur Jawa Tengah selaku Ketua TKPK Provinsi Jawa Tengah setiap tahun, dengan sistematika:

a. Bab I Pendahuluan :

Berisikan latar belakang pelaksanaan kegiatan perangkat daerah di lokasi desa dampungan, dasar hukum, maksud dan tujuan, sasaran, dan hasil yang diharapkan.

b. Bab II Pelaksanaan :

Berisikan penjelasan terkait persiapan pelaksanaan, tahapan pelaksanaan, pihak yang terlibat, hasil intervensi di desa dampungan, pembiayaan.

c. Bab III Permasalahan dan solusinya :

Berisikan identifikasi permasalahan/kendala yang dihadapi beserta upaya penyelesaiannya.

d. Bab IV Kesimpulan dan Saran:

Berisikan penjelasan singkat terkait hasil/dampak kegiatan pada desa dampungan.



## BAB V PENUTUP

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Buku Panduan ini diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam melakukan berbagai aktivitas Gerakan “**Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan Menuju Desa Lebih Berdaya**”, mulai dari pemilihan lokasi, *assessment*, identifikasi potensi, masalah dan kebutuhan, perencanaan kegiatan, sampai dengan pada pelaksanaan intervensi kegiatan.

Melalui serangkaian aktivitas tersebut diharapkan permasalahan kemiskinan di perdesaan dapat ditangani secara komprehensif, berkelanjutan dan dilandasi dengan semangat kebersamaan, serta keswadayaan masyarakat. Dengan demikian sasaran dan target penanggulangan kemiskinan sebagaimana telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 dapat dicapai.

Akhirnya upaya penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah khususnya di wilayah perdesaan melalui Gerakan “**Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan Menuju Desa Lebih Berdaya**” akan berhasil dengan optimal manakala didukung dengan komitmen, peran nyata dan rasa tanggungjawab yang tinggi dari seluruh Perangkat Daerah bersama dengan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, *stakeholder* terkait dan masyarakat desa.

## LAMPIRAN

### Lampiran I

#### Form 1 : DAFTAR INVENTARISASI POTENSI DESA

NO	POTENSI DESA DAN KONDISI DDESA (satuan kuantitatif)	PERMASALAHAN	BENTUK INTERVENSI		KETERANGAN
			SUDAH DILAKUKAN	PERLU DILAKUKAN	
1	2	3	4	5	6
1	<b>Pertanian</b> (Contoh: sayuran, buah-buahan, palawija, padi, jagung, ketela pohon, kacang tanah, vanili, kopi, empon-empon, rempah, tembakau, dsb)				
2	<b>Peternakan dan Perikanan</b> (Contoh : kambing, sapi, bebek, lebah madu, lele, nila)				
3	Ketersediaan Sumber Mata Air				
4	<b>Desa Wisata</b> (Contoh : wisata alam, wisata kebun sayur, hutan pinus, air terjun, wisata religi, wisata kebun buah, wisata sejarah)				
5	Ketersediaan Internet di Desa				
6	Akses Jalan dan transportasi				
7	<b>UMKM</b> (Contoh : olahan hasil pertanian, keripik tempe/pisang, kerupuk, gula kelapa, gula aren, konveksi, kerajinan, dsb)				
8	<b>Kesenian Lokal</b> (Contoh : wayang, campursari, ketoprak, karawitan, jatilan, srandul, ketoprak, dsb)				
9	Potensi lainnya				

Petunjuk pengisian tabel:

1. Nomor; diisi nomor urut tabel.
2. Potensi desa; diisi dengan kondisi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang tersedia di desa tersebut;
3. Permasalahan; diisi dengan kondisi yang belum sesuai harapan terkait potensi desa namun belum dilakukan intervensi;
4. Bentuk intervensi yang sudah dilakukan; kegiatan intervensi yang sudah dilaksanakan, sampai dengan saat ini masih berjalan sesuai dengan potensi desa yang ada;
5. Bentuk intervensi yang perlu dilakukan; kegiatan intervensi yang perlu dilaksanakan, merujuk pada potensi desa yang ada;
6. Keterangan; diisi catatan lain yang dibutuhkan, termasuk rencana tindak lanjut penyempurnaan terhadap intervensi yang sudah dilakukan pada kolom 4.

**Form 2 : DAFTAR HASIL SCANNING CEPAT KARAKTERISTIK  
MASYARAKAT DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN RENDAH**

<b>NO</b>	<b>KARAKTERISTIK MASYARAKAT DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN RENDAH</b>	<b>KONDISI AWAL (VOLUME/SATUAN)</b>	<b>HASIL INTERVENSI TAHUN PERTAMA</b>	<b>HASIL INTERVENSI TAHUN KEDUA</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>			<b>4</b>
1	Tidak masuk dalam kepesertaan program-program pemerintah				
	a. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/Kartu Perlindungan Sosial (KPS)				
	b. Kartu Indonesia Pintar (KIP)				
	c. Kartu Indonesia Sehat (KIS)/BPJS Kesehatan PBI/Jamkesmas				
	d. BPJS Kesehatan Peserta Mandiri				
	e. Program Keluarga Harapan (PKH)/BLT				
	f. Beras untuk Orang Miskin (BPNT)				
2	Anggota keluarga yang tidak memiliki kartu identitas (KTP, Akte Kelahiran, Kartu Pelajar, dan KIA)				
3	Anak yang tidak bersekolah pada usia sekolah (7-18 tahun)				
4	Anggota rumah tangga yang memiliki penyakit kronis dan disabilitas.				
	a. Penyakit kronis				
	b. Disabilitas				
	1) Potensial				
	2) Non Potensial				
5	Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)				
	a. Prioritas 1				
	b. Prioritas 2				
	c. Prioritas 3				
6	Sumber air minum (sumur/mata air) yang tidak terlindungi.				
7	Tidak memiliki fasilitas tempat BAB (jamban).				
8	Sumber penerangan utama bukan listrik.				
9	Kepala rumah tangga yang tidak bekerja.				
10	Individu resiko stunting				
	a. Remaja putri anemia				

<b>NO</b>	<b>KARAKTERISTIK MASYARAKAT DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN RENDAH</b>	<b>KONDISI AWAL (VOLUME/SATUAN)</b>	<b>HASIL INTERVENSI TAHUN PERTAMA</b>	<b>HASIL INTERVENSI TAHUN KEDUA</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>			<b>4</b>
	b. Ibu hamil KEK (Kekurangan Energi Kronis)				
	c. Balita beresiko stunting				
	1) Stunting				
	2) Wasting				
	3) Underweight				

Petunjuk pengisian tabel:

- a. Nomor; diisi nomor urut tabel.
- b. Karakteristik masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah sesuai dengan kondisi di desa sasaran.
- c. Kondisi awal; diisi dengan volume/satuan hasil identifikasi karakteristik yang bersangkutan pada saat scanning cepat.
- d. Keterangan : diisi catatan lain yang dibutuhkan.

### Form 3 : PEMANTAUAN PENGEMBANGAN POTENSI DESA

NO	HASIL INVENTARISASI POTENSI DESA (satuan kuantitatif)	INTERVENSI YANG DILAKUKAN (volume / satuan)	KENDALA /HAMBATAN	SOLUSI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	<b>Pertanian</b> (Contoh: sayuran, buah-buahan, palawija, padi, jagung, ketela pohon, kacang tanah, vanili, kopi, empon-empon, rempah, tembakau, dsb)				
2	<b>Peternakan dan Perikanan</b> (Contoh : kambing, sapi, bebek, lebah madu, lele, nila)				
3	Ketersediaan Sumber Mata Air				
4	<b>Desa Wisata</b> (Contoh : wisata alam, wisata kebun sayur, hutan pinus, air terjun, wisata religi, wisata kebun buah, wisata sejarah)				
5	Ketersediaan Internet di Desa				
6	Akses Jalan dan transportasi				
7	<b>UMKM</b> (Contoh : olahan hasil pertanian, keripik tempe/pisang, kerupuk, gula kelapa, gula aren, konveksi, kerajinan, dsb)				
8	<b>Kesenian Lokal</b> (Contoh : wayang, campursari, ketoprak, karawitan, jatilan, srandul, ketoprak, dsb)				
9	Potensi lainnya				

Petunjuk pengisian tabel:

1. Nomor; diisi nomor urut tabel.
2. Hasil inventarisasi potensi desa; diisi dengan isian sesuai pada form 1 kolom 2; Daftar Inventarisasi Potensi dan Permasalahan Desa.
3. Intervensi yang dilakukan (volume/satuan); diisi dengan realisasi pelaksanaan intervensi kegiatan yang telah/sedang dilaksanakan.
4. Kendala/Hambatan; diisi dengan permasalahan yang menghambat pelaksanaan intervensi.
5. Solusi; diisi dengan upaya penyelesaian terhadap kendala/hambatan yang tertuang di kolom 4.
6. Keterangan; diisi catatan lain yang dibutuhkan.

Lampiran IV

**Form 4: PEMANTAUAN PERKEMBANGAN KARAKTERISTIK MASYARAKAT DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN RENDAH**

NO	KARAKTERISTIK MASYARAKAT DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN RENDAH	KONDISI AWAL (volume/satuan)	INTERVENSI YANG DILAKUKAN	HAMBATAN / KENDALA	SOLUSI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Tidak masuk dalam kepesertaan program-program pemerintah					
	a. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/Kartu Perlindungan Sosial (KPS)					
	b. Kartu Indonesia Pintar (KIP)					
	c. Kartu Indonesia Sehat (KIS)/BPJS Kesehatan PBI/Jamkesmas					
	d. BPJS Kesehatan Peserta Mandiri					
	e. Program Keluarga Harapan (PKH)/BLT					
	f. Beras untuk Orang Miskin (BPNT)					
2	Anggota keluarga yang tidak memiliki kartu identitas (KTP, Akte Kelahiran, Kartu Pelajar, dan KIA)					
3	Anak yang tidak bersekolah pada usia sekolah (7-18 tahun)					
4	Anggota rumah tangga yang memiliki penyakit kronis dan disabilitas.					
	a. Penyakit kronis					
	b. Disabilitas					
	1) Potensial					
	2) Non Potensial					
5	Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)					
	a. Prioritas 1					
	b. Prioritas 2					
	c. Prioritas 3					
6	Sumber air minum (sumur/mata air) yang tidak terlindungi.					
7	Tidak memiliki fasilitas tempat BAB (jamban).					
8	Sumber penerangan utama bukan listrik.					
9	Kepala rumah tangga yang tidak bekerja.					
10	Individu resiko stunting					
	a. Remaja putri anemia					
	b. Ibu hamil KEK (Kekurangan Energi Kronis)					
	c. Balita beresiko stunting					
	1) Stunting					

NO	KARAKTERISTIK MASYARAKAT DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN RENDAH	KONDISI AWAL (volume/satuan)	INTERVENSI YANG DILAKUKAN	HAMBATAN / KENDALA	SOLUSI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
	2) Wasting					
	3) Underweight					

Petunjuk pengisian tabel:

1. Nomor; diisi nomor urut tabel.
2. Karakteristik masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah sesuai dengan kondisi di desa sasaran.
3. Kondisi awal; diisi dengan volume/satuan hasil identifikasi karakteristik yang bersangkutan pada saat *scanning* cepat.
4. Intervensi yang dilakukan (volume/satuan); diisi dengan realisasi pelaksanaan intervensi kegiatan yang telah/sedang dilaksanakan.
5. Kendala/Hambatan; diisi dengan permasalahan yang menghambat pelaksanaan intervensi.
6. Solusi; diisi dengan upaya penyelesaian terhadap kendala/hambatan yang tertuang di kolom 5.
7. Keterangan; diisi catatan lain yang dibutuhkan.

## Form 5 : EVALUASI PENGEMBANGAN POTENSI DESA

NO	HASIL INVENTARISASI POTENSI DESA (satuan kuantitatif)	PERMASALAHAN	KONDISI SETELAH INTERVENSI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	<b>Pertanian</b> (Contoh: sayuran, buah-buahan, palawija, padi, jagung, ketela pohon, kacang tanah, vanili, kopi, empon-empon, rempah, tembakau, dsb)			
2	<b>Peternakan dan Perikanan</b> (Contoh : kambing, sapi, bebek, lebah madu, lele, nila)			
3	Ketersediaan Sumber Mata Air			
4	<b>Desa Wisata</b> (Contoh : wisata alam, wisata kebun sayur, hutan pinus, air terjun, wisata religi, wisata kebun buah, wisata sejarah)			
5	Ketersediaan Internet di Desa			
6	Akses Jalan dan transportasi			
7	<b>UMKM</b> (Contoh : olahan hasil pertanian, keripik tempe/pisang, kerupuk, gula kelapa, gula aren, konveksi, kerajinan, dsb)			
8	<b>Kesenian Lokal</b> (Contoh : wayang, campursari, ketoprak, karawitan, jatilan, srandul, ketoprak, dsb)			
9	Potensi lainnya			

Petunjuk pengisian tabel:

1. Nomor; diisi nomor urut tabel.
2. Hasil inventarisasi potensi desa; diisi dengan isian sesuai pada form 1 kolom 2 (Daftar Inventarisasi Potensi Desa).
3. Permasalahan; diisi dengan kondisi yang belum sesuai harapan terkait potensi desa namun belum dilakukan intervensi.
4. Kondisi setelah intervensi; diisi dengan hasil setelah dilakukan intervensi.
5. Keterangan; diisi catatan lain yang diperlukan.

**Form 6 : EVALUASI PERKEMBANGAN KARAKTERISTIK MASYARAKAT DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN RENDAH**

<b>NO</b>	<b>KARAKTERISTIK MASYARAKAT DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN RENDAH</b>	<b>KONDISI AWAL (volume/satuan)</b>	<b>KONDISI SETELAH INTERVENSI (volume / satuan)</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Tidak masuk dalam kepesertaan program-program pemerintah			
	a. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/Kartu Perlindungan Sosial (KPS)			
	b. Kartu Indonesia Pintar (KIP)			
	c. Kartu Indonesia Sehat (KIS)/BPJS Kesehatan PBI/Jamkesmas			
	d. BPJS Kesehatan Peserta Mandiri			
	e. Program Keluarga Harapan (PKH)/BLT			
	f. Beras untuk Orang Miskin (BPNT)			
2	Anggota keluarga yang tidak memiliki kartu identitas (KTP, Akte Kelahiran, Kartu Pelajar, dan KIA)			
3	Anak yang tidak bersekolah pada usia sekolah (7-18 tahun)			
4	Anggota rumah tangga yang memiliki penyakit kronis dan disabilitas.			
	a. Penyakit kronis			
	b. Disabilitas			
	1) Potensial			
	2) Non Potensial			
5	Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)			
	a. Prioritas 1			
	b. Prioritas 2			
	c. Prioritas 3			
6	Sumber air minum (sumur/ mata air) yang tidak terlindungi.			
7	Tidak memiliki fasilitas tempat BAB (jamban).			
8	Sumber penerangan utama bukan listrik.			
9	Kepala rumah tangga yang tidak bekerja.			
10	Individu resiko stunting			
	a. Remaja putri anemia			
	b. Ibu hamil KEK (Kekurangan Energi Kronis)			
	c. Balita beresiko stunting			
	1) Stunting			
	2) Wasting			
	3) Underweight			

Petunjuk pengisian tabel:

1. Nomor; diisi nomor urut tabel.
2. Karakteristik masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah sesuai dengan kondisi di desa sasaran.
3. Kondisi awal; diisi dengan volume/satuan hasil identifikasi karakteristik yang bersangkutan pada saat scanning cepat.
4. Kondisi setelah intervensi; diisi dengan volume/satuan hasil identifikasi karakteristik yang bersangkutan setelah dilakukan intervensi.
5. Keterangan; diisi catatan lain yang dibutuhkan.

**VARIABEL PADA BASIS DATA TERPADU JAWA TENGAH**

<b>NO</b>	<b>VARIABEL</b>	<b>KRITERIA</b>
1	Provinsi	Kode Provinsi
2	Kabupaten/Kota	Kode Kabupaten/Kota
3	Kecamatan	Kode Kecamatan
4	Desa/Kelurahan	Kode Desa/Kelurahan
5	Alamat/SLS	Disi Dengan Alamat RT/RW
6	Dusun	Diisi Dengan Dusun
7	Nama Kepala Rumah Tangga	Diisi Nama Kepala Rumah Tangga
8	Nama Ibu Kandung	Diisi Nama Ibu Kandung
9	Tempat, Tanggal Lahir	Diisi Tempat dan Tanggal Lahir sesuai KTP
10	Jumlah Anggota Rumah Tangga	Disi Jumlah Anggota Rumah Tangga
11	Jenis Kelamin	1.Laki-Laki 2.Perempuan
12	Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga	1.Kepala Rumah Tangga 2.Istri/Suami 3.Anak 4.Menantu 5.Cucu 6.Orang Tua/Mertua 7.Pembantu Ruta 8.Lainnya
13	Hubungan dengan Kepala Keluarga	1.Kepala Keluarga 2.Istri/Suami 3.Anak 4.Menantu 5.Cucu 6.Orang Tua/Mertua 7.Pembantu Ruta 8.Lainnya
14	Status Perkawinan	1.Belum Kawin 2.Kawin/Nikah 3.Cerai Hidup 4.Cerai Mati
15	Kepemilikan Akta/Buku Nikah atau Akta Cerai	0.Tidak memiliki 1.Ya, dapat ditunjukkan 2.Ya, tidak dapat ditunjukkan
16	Tercantum dalam Kartu Keluarga Rumah Tangga ini	1.Ya 2.Tidak

<b>NO</b>	<b>VARIABEL</b>	<b>KRITERIA</b>
17	Kepemilikan Kartu Identitas	1. Tidak Memiliki 2. Akta Kelahiran 2.Kartu Pelajar 4.KTP 8.SIM
18	Umur (Tahun)	Umur saat pendataan masing-masing anggota keluarga
19	Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal Yang Ditempati	1.Milik Sendiri 2.Kontrak/sewa 3.Bebas sewa 4.Dinas 5.Lainnya
20	Status Lahan Tempat Tinggal Yang Ditempati	1.Milik Sendiri 2.Milik orang lain 3.Tanah negara 4.Lainnya
21	Bukti Kepemilikan Lahan	1. SHM 2. Letter C 3. Letter D 4. Surat Keterangan Desa 5. Tidak Ada
22	Luas Lahan	m <sup>2</sup>
23	Pondasi Rumah	1. Ada 2. Tidak Ada
24	Kondisi Struktur Bangunan	1. Baik 2. Rusak Sebagian 3. Rusak Berat
25	Ada Jendela	1. Ada 2. Tidak Ada
26	Jumlah Kamar	Diisi Dengan jumlah kamar
27	Luas Lantai	m <sup>2</sup>
28	Jenis Lantai Terluas	1.Marmer/granit 2.Keramik 3.Parket/vinil/ permadani 4.Ubin/tegel/teraso 5.Kayu/papan kualitas tinggi 6.Semen/bata merah 7.Bambu 8.Kayu/papan kualitas rendah 9.Tanah 10.Lainnya
29	Jenis Dinding Terluas	1.Tembok 2.Plesteran anyaman bambu/kawat 3.Kayu 4.Anyaman Bambu 5.Batang Kayu

<b>NO</b>	<b>VARIABEL</b>	<b>KRITERIA</b>
		6.Bambu 7.Lainnya
30	Kondisi Dinding Terluas	1.Bagus/kualitas tinggi 2.Jelek/kualitas rendah
31	Jenis Atap Terluas	1.Beton/genteng beton 2.Genteng keramik 3.Genteng metal 4.Genteng tanah liat 5.Asbes 6.Seng 7.Sirap 8.Bambu 9.Jerami/ijuk/daun-daunan/rumbia 10.Lainnya
32	Kondisi Atap Terluas	1.Bagus/kualitas tinggi 2.Jelek/kualitas rendah
33	Sumber Air Minum	1.Air kemasan bermerk 2.Air isi ulang 3.Leding meteran 4.Leding eceran 5.Sumur bor/pompa 6.Sumur terlindung 7.Sumur tak terlindung 8.Mata air terlindung 9.Mata air tak terlindung 10.Air Sungai/danau/waduk 11.Air hujan 12.Lainnya
34	Cara Memperoleh Air Minum	1.Membeli eceran 2.Langganan 3.Tidak membeli
35	Sumber Penerangan Utama	1.Listrik PLN 2.Listrik non PLN 3.Bukan Listrik
36	Daya Listrik	1. 450 Watt 2. 900 Watt 3. 1.300 Watt 4. 2.200 Watt 5. > 2.200 watt 6. Tanpa meteran
37	Status Kepemilikan Listrik	1. Milik Sendiri 2. Menumpang Tetangga

<b>NO</b>	<b>VARIABEL</b>	<b>KRITERIA</b>
38	Bahan Bakar/Energi Utama Untuk Memasak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Listrik</li> <li>2. Gas lebih dari 3 kg</li> <li>3. Gas 3 kg</li> <li>4. Gas kota/biogas</li> <li>5. Minyak tanah</li> <li>6. Briket</li> <li>7. Arang</li> <li>8. Kayu bakar</li> <li>9. Tidak memasak di rumah</li> </ol>
39	Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sendiri</li> <li>2. Bersama</li> <li>3. Umum</li> <li>4. Tidak ada</li> </ol>
40	Tempat Pembuangan Akhir Tinja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tangki</li> <li>2. SPAL</li> <li>3. Lubang tanah</li> <li>4. Kolam/sawah/sungai/danau/laut</li> <li>5. Pantai/tanah lapang/ kebun</li> <li>6. Lainnya</li> </ol>
41	Ada Ibu Hamil	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ya</li> <li>2. Tidak</li> </ol>
42	Usia Ibu Hamil	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lebih dari 35 Tahun</li> <li>2. 20-35 Tahun</li> <li>3. Kurang dari 20 Tahun</li> </ol>
43	Apakah ada Balita	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ya</li> <li>2. Tidak</li> </ol>
44	Apakah ada Baduta	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Ya</li> <li>4. Tidak</li> </ol>
45	Jumlah Balita/Baduta Terbanyak di 1 KK	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1</li> <li>2. 2</li> <li>3. Lebih dari 2</li> </ol>
46	Jarak Usia Baduta/Balita dengan Saudara/inya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. &lt; 2 tahun</li> <li>2. 2 tahun</li> <li>3. &gt; 2 tahun</li> </ol>
47	Status Keberadaan ART	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tinggal di RUTA</li> <li>2. Meninggal</li> <li>3. Tidak Tinggal di RUTA/Pindah</li> <li>4. Tidak Ditemukan</li> </ol>
48	Partisipasi Sekolah	<ol style="list-style-type: none"> <li>0. Tidak/belum pernah Sekolah</li> <li>1. Masih Sekolah</li> <li>2. Tidak bersekolah lagi</li> </ol>
49	Jenjang Dan Jenis Pendidikan Tertinggi Yang Pernah/Sedang Diduduki	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SD/SDLB</li> <li>2. Paket A</li> <li>3. M. Ibtidaiyah</li> </ol>

NO	VARIABEL	KRITERIA
		4.SMP/SMPLB 5.Paket B 6.M. Tsanawiyah 7.SMA/SMK/SMALB 8.Paket C 9.M. Aliyah 10.Perguruan Tinggi
50	Kelas Tertinggi Yang Pernah/Sedang Diduduki	1 2 3 4 5 6 7 8 (Tamat)
51	Ijazah Tertinggi Yang Dimiliki	0.Tidak Punya Ijazah 1.SD/Sederajat 2.SMP/Sederajat 3.SMA/sederajat 4.D1/D2/D3 5.D4/S1 6.S2/S3
52	Jenis Disabilitas/ Cacat	0.Tidak cacat 1.Tuna daksa/cacat tubuh 2.Tuna netra/buta 3.Tuna rungu 4.Tuna wicara 5.Tuna rungu & wicara 6.Tuna netra & cacat tubuh 7.Tuna netra, rungu & wicara 8.Tuna rungu, wicara & cacat tubuh 9.Tuna rungu, wicara, netra & cacat tubuh 10.Cacat mental retardasi 11.Mantan penderita gangguan jiwa 12.Cacat fisik & mental
53	Penyakit Kronis/Menahun	0.Tidak ada 1.Hipertensi 2.Rematik 3.Asma 4.Masalah Jantung 5.Diabetes (Kencing manis) 6.Tuberculosis (TBC) 7.Stroke 8.Kanker atau tumor ganas 9.Lainnya (gagal ginjal, paru-paru flek dan sejenisnya)
54	Status Kehamilan Wanita	1.Ya 2.Tidak

NO	VARIABEL	KRITERIA
55	Lapangan Usaha Dari Pekerjaan Utama	1.Pertanian Tanaman Padi & Palawija 2.Hortikultura 3.Perkebunan 4.Perikanan Tangkap 5.Perikanan Budidaya 6.Peternakan 7.Kehutanan & Pertanian Lainnya 8.Pertambangan/Penggalian 9.Industri Pengolahan 10.Listrik & Gas 11.Bangunan/konstruksi 12.Perdagangan 13.Hotel & Rumah Makan 14.Transportasi & pergudangan 15.Informasi & komunikasi 16.Keuangan & asuransi 17.Jasa pendidikan 18.Jasa kesehatan 19.Jasa kemasyarakatan, pemerintahan & perorangan 20.Pemulung 21.Lainnya
56	Status Kedudukan Dalam Pekerjaan Utama	1.Berusaha sendiri 2.Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar 3.Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar 4.Buruh/karyawan/pegawai swasta 5.PNS/TNI/Polri/BUMN/ BUMD/ Anggota legislatif 6.Pekerja bebas pertanian 7.Pekerja bebas non pertanian 8.Pekerja keluarga/tidak dibayar

NO	VARIABEL	KRITERIA
57	Jenis Ketrampilan yang dibutuhkan	0. Tidak Ada 1. Pelatihan Pertukangan 2. Pelatihan Perbengkelan 3. Pelatihan Las 4. Pelatihan Elektronika 5. Pelatihan Tata Boga 6. Pelatihan Tata Busana 7. Pelatihan Komputer 8. Pelatihan Digital Marketing 9. Pelatihan Perhotelan 10. Pelatihan Pertukangan kayu 11. Pelatihan Bahasa 12. Pelatihan Pertanian 13. Pelatihan Peternakan/Perikanan 14. Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian 15. Pelatihan Tangkap Ikan dengan Kapal 16. Pelatihan Web 17. Pelatihan Kerajinan Kreatif 18. Pelatihan Kewirausahaan 19. Pelatihan Servis AC
58	Bekerja/Membantu Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu	1.Ya, Berapa Jam? 2.Tidak
59	Rumah Tangga Memiliki Sendiri Aset Bergerak: 1)Tabung gas 5,5 kg atau lebih 2)Lemari es/kulkas 3)AC 4)Pemanas air (water heater) 5)Telepon rumah (PSTN) 6)Televisi 7)Emas/perhiasan & Tabungan (senilai 10 gram emas) 8)Komputer/laptop 9)Sepeda 10)Sepeda motor 11)Mobil 12)Perahu 13)Motor tempel 14)Perahu motor 15)Kapal	Dengan Jawaban:  1.Ya 2.Tidak 3.Ya 4.Tidak
60	Jumlah Pendapatan RUTA	1. 0 - 400.000 2. 400.001 - 800.000 3. 800.001 - 1.200.000 4. 1.200.001 - 1.600.000

NO	VARIABEL	KRITERIA
		5. 1.600.0001 - 2.000.000 6. < 2.000.000
61	Jumlah Pengeluaran RUTA	1. 0 - 400.000 2. 400.001 - 800.000 3. 800.001 - 1.200.000 4. 1.200.001 - 1.600.000 5. 1.600.0001 - 2.000.000 6. < 2.000.000
62	Kebutuhan Makan lebih besar dari setengah total pengeluaran	1. Ya 2. Tidak
63	Ada Pengeluaran membeli pakaian dalam 1 tahun	1. Ya 2. Tidak
64	Pernah khawatir tidak makan dalam 1 tahun terakhir	1. Ya 2. Tidak
65	Rumah Tangga Memiliki Aset Tidak Bergerak: 1)Lahan 2)Rumah di tempat lain	Dengan jawaban:  1.Ya 2.Tidak 3.Ya 4.Tidak
66	Jumlah Ternak yang Dimiliki: 1)Sapi 2)Kerbau 3)Kuda 4)Babi 5)Kambing/domba	Berapa Ekor
67	Rumah Tangga Menjadi Peserta Program/ Memiliki Kartu Program: 1)Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) / Kartu Perlindungan Sosial (KPS) 2)Kartu Indonesia Pintar (KIP) / Bantuan Siswa Miskin (BSM) 3)Kartu Indonesia Sehat (KIS) / BPJS Kesehatan PBI / Jamkesmas 4)BPJS Kesehatan Peserta Mandiri 5)Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) / BPJS Ketenagakerjaan 6)Asuransi Kesehatan Lainnya 7)Program Keluarga Harapan (PKH) 8)Beras untuk Orang Miskin (Raskin) 9)Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Dengan Jawaban:  1.Ya 2.Tidak 3.Ya 4.Tidak



**PEMERINTAH PROVINSI  
JAWA TENGAH**